

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut.

Guna mengetahui sejauh mana pengimplementasian SAKIP pada setiap instansi pemerintah, serta untuk mendorong upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan kinerja. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah (Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memiliki fungsi dalam melakukan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sementara itu, setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi oleh APIP ini diatur lebih lanjut dalam Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB atas implementasi SAKIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 menempatkan Kementerian Keuangan dengan nilai akuntabilitas kinerja tertinggi diantara seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Meskipun memperoleh predikat memuaskan dengan nilai 83,59 (A), akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait penataan tata laksana dan penguatan pengawasan. Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan implementasi SAKIP agar senantiasa dapat ditingkatkan setiap tahunnya dan dapat memperoleh predikat sangat memuaskan (AA). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai akuntabilitas Kementerian Keuangan adalah dengan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mengawal penerapan manajemen kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi yang memberikan manfaat bagi publik.

Peran Inspektorat Jenderal tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015, dimana diterangkan bahwa di dalam penilaian komponen dan sub komponen SAKIP pada Pemerintah Pusat yang meliputi Kementerian/Lembaga dan unit organisasi, unit organisasi yang disampling setidaknya terdiri dari Inspektorat Jenderal dan unit kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama Kementerian/Lembaga tersebut. Hal tersebut memperjelas posisi strategis Inspektorat Jenderal, selain sebagai APIP yang bertugas dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya tetapi juga sebagai pihak yang selalu dievaluasi secara rutin oleh Kemenpan-RB dalam pengimplementasian SAKIP pada unitnya, sehingga

pengimplementasian SAKIP yang baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan mendorong terwujudnya penguatan implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menguji beberapa faktor atau variabel yang dapat berpengaruh terhadap penguatan implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Faktor pertama yang akan diuji dalam penelitian adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang baik atas peraturan menjadi tuntutan dalam penerapan suatu kebijakan pada instansi pemerintah. Demikian pula dalam implementasi SAKIP, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan komponen yang senantiasa melekat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja. Penelitian yang dilakukan Soleman (2007) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh sangat signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor kedua yang akan diuji adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi menggambarkan loyalitas pegawai dalam berusaha dan bertindak secara aktif untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Untuk dapat membangun SAKIP yang baik diperlukan komitmen dan kesungguhan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya semakin tinggi komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Faktor terakhir yang akan digunakan dalam penelitian adalah kejelasan sasaran anggaran. Kenis (1979) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin dan Suyanto (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ketiga faktor tersebut yang terdiri dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi, dan kejelasan sasaran anggaran akan dianalisis sesuai dengan kondisi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penulis akan mencoba menuangkan penelitian ini dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP?

- b. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAKIP?
- c. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap implementasi SAKIP?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap implementasi SAKIP.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi SAKIP.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap implementasi SAKIP.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis implementasi SAKIP dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Berikut ini penulis akan menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka teoritis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya desain penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan

variabel penelitian, metode penelitian, serta metodologi analisis yang digunakan.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

#### BAB V PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian mendatang.

